An-nida
Jurnal Pendidikan Islam
e-ISSN 2963-9255
p-ISSN 2476-9177

# Ambivalensi Kebijakan Pendidikan pada Masa Pendudukan Jepang dan Implikasinya terhadap Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia

**Sitti Aliyah***
Program Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Bone, Indonesia
Email: aliyahiainbone25@gmail.com

**Idrus Latif**
Program Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Bone, Indonesia
Email: idruslatif.iainbone@gmail.com

*Corespondence
*Received: 2026-06-26 ; Accepted: 2026-07-21; Published: 2026-10-17*

***Abstract***
*This study examines the ambivalent character of the education policy implemented by Japan during its occupation of Indonesia (1942–1945) and analyzes its long-term implications for the institutional development of Islamic education. Employing a qualitative descriptive design with a historical approach, the research draws on library research of nationally accredited journal articles and reference books, analyzed through the four stages of the historical method: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that Japan simultaneously pursued two contradictory orientations. At the level of general education, it dismantled the discriminatory Dutch colonial system and replaced it with a simplified, centralized, and militaristic model oriented toward war mobilization rather than intellectual advancement. At the level of Islamic institutions, by contrast, Japan adopted an accommodative strategy through the establishment of the Shumubu (Office of Religious Affairs), the formation of Masyumi, and the recruitment of influential kyai into the occupation bureaucracy. Although politically motivated, this accommodation left an enduring institutional legacy that underpinned the post-independence consolidation of Islamic education, including the founding of the Ministry of Religious Affairs and the strengthening of the madrasah and pesantren network. The study concludes that the Japanese occupation constituted a formative institutional transition rather than merely a period of educational decline.*

***Keywords***: *Islamic education; Japanese occupation; Shumubu.*

DOI: https://doi.org/10.30999/an-nida.v15i1.4282

**Abstrak**
Penelitian ini mengkaji karakter ambivalen kebijakan pendidikan yang diterapkan Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia (1942–1945) dan menganalisis implikasi jangka panjangnya terhadap perkembangan kelembagaan pendidikan Islam. Dengan desain kualitatif deskriptif berpendekatan historis, penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan terhadap artikel jurnal terakreditasi nasional dan buku rujukan, yang dianalisis melalui empat tahapan metode sejarah: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang secara bersamaan menempuh dua orientasi yang bertolak belakang. Pada tataran pendidikan umum, Jepang membongkar sistem kolonial Belanda yang diskriminatif dan menggantinya dengan model yang sederhana, sentralistik, dan militeristik yang berorientasi pada mobilisasi perang alih-alih pengembangan intelektual. Sebaliknya, pada tataran kelembagaan Islam, Jepang menempuh strategi akomodatif melalui pembentukan Shumubu (Kantor Urusan Agama), pendirian Masyumi, serta perekrutan kiai berpengaruh ke dalam birokrasi pendudukan. Meskipun bermuatan kepentingan politik, akomodasi tersebut meninggalkan warisan kelembagaan yang bertahan lama dan menjadi fondasi bagi konsolidasi pendidikan Islam pascakemerdekaan, termasuk lahirnya Kementerian Agama serta menguatnya jaringan madrasah dan pesantren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa pendudukan Jepang merupakan titik transisi kelembagaan yang formatif, bukan semata periode kemunduran pendidikan.

**Kata Kunci**: pendidikan Islam; pendudukan Jepang; Shumubu.

## A. Pendahuluan

Pendidikan tidak pernah berdiri di ruang yang netral. Ia bukan sekadar proses transmisi pengetahuan, melainkan instrumen strategis dalam pembentukan sumber daya manusia sekaligus arena kontestasi kekuasaan, sehingga arah dan corak sistem pendidikan suatu bangsa senantiasa dibentuk oleh konfigurasi politik yang menaunginya. Setiap rezim yang berkuasa cenderung menempatkan pendidikan sebagai perpanjangan tangan ideologi dan kepentingannya, baik untuk melanggengkan dominasi maupun untuk memobilisasi warga demi tujuan tertentu. Fenomena keterkaitan erat antara kekuasaan dan pendidikan ini tampak sangat jelas pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942–1945, ketika seluruh struktur ketatanegaraan—termasuk pendidikan—diarahkan untuk menopang kepentingan militer Jepang dalam Perang Asia Timur Raya (Fadli & Kumalasari, 2019). Dalam kurun yang relatif singkat itu, wajah pendidikan Indonesia mengalami perombakan mendasar yang berbeda secara diametral dari warisan kolonial Belanda.

Berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda yang membangun sistem pendidikan berlapis dan diskriminatif berdasarkan status sosial serta keturunan, Jepang membongkar sistem tersebut dan menggantinya dengan model baru yang lebih sederhana, seragam, dan mudah dikendalikan secara sentralistik

(Muslimin & Hudaidah, 2021). Sekolah-sekolah berbahasa Belanda dihapus, jenjang pendidikan dipangkas, dan orientasi kurikulum dialihkan pada pembentukan loyalitas serta kesiapsiagaan fisik-militer. Penyederhanaan ini, sebagaimana ditegaskan sejumlah pengkaji, tidak berpijak pada semangat pemerataan mutu, melainkan pada logika efisiensi mobilisasi tenaga kerja dan prajurit yang dibutuhkan mesin perang Jepang (Hudaidah & Karwana, 2022; Suyitno, 2021).

Secara teoretis, keterkaitan antara kebijakan pada satu periode dan kelembagaan pada periode berikutnya dapat dibaca melalui gagasan warisan kelembagaan (institutional legacy), yakni pandangan bahwa struktur dan pengalaman yang terbentuk pada masa lampau cenderung membekas dan membentuk pilihan-pilihan kelembagaan di masa selanjutnya. Dalam bingkai ini, kebijakan keagamaan Jepang tidak dapat dinilai semata dari niat awalnya yang bersifat politis, melainkan juga dari jejak struktural yang ditinggalkannya. Sudut pandang demikian penting untuk memahami mengapa lembaga-lembaga yang lahir dalam konteks pendudukan yang koersif justru dapat menjelma menjadi tonggak bagi perkembangan pendidikan Islam yang otonom pada masa kemerdekaan (Daulay, 2019; Idris, 2022).

Yang menarik untuk dikaji lebih jauh, kebijakan pendidikan Jepang tidak berhenti pada ranah pendidikan umum semata, tetapi turut menyentuh secara khusus posisi umat Islam sebagai kelompok mayoritas. Berbeda dengan pemerintah kolonial Belanda yang cenderung mencurigai dan membatasi ruang gerak kelembagaan Islam, Jepang justru menempuh pendekatan akomodatif dengan mendirikan Shumubu atau Kantor Urusan Agama pada tahun 1942, membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai pengganti Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), serta merekrut sejumlah kiai berpengaruh ke dalam struktur birokrasi pendudukan (Rizal, 2020; Adnan Lira dkk., 2024). Kebijakan ini pada dasarnya merupakan strategi politik untuk meraih simpati umat Islam sekaligus memobilisasi mereka guna kepentingan perang, namun secara tidak langsung membuka ruang bagi tumbuhnya kelembagaan pendidikan Islam yang lebih terorganisasi (Saifudin & Saepuddin, 2020).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek pendidikan pada masa pendudukan Jepang dari berbagai sudut pandang. Muslimin dan Hudaidah (2021) serta Anggini dkk. (2024) memetakan periodisasi jenjang pendidikan umum yang diberlakukan Jepang di Indonesia, sementara Irawan dan Yuliato (2019) dan Abbas (2018) menyoroti penyelenggaraan pendidikan di wilayah Jawa beserta implikasi sosialnya. Di sisi lain, kajian yang secara spesifik menyasar dimensi keislaman juga berkembang, seperti Syarif (2019) yang menelaah politik pendidikan Jepang dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam, Hasanah dkk. (2023) yang membahas dinamika peradaban Islam Indonesia pada masa penjajahan Jepang, serta Rizal (2020) yang menguraikan

pergerakan Islam Indonesia pada masa Jepang melalui pembentukan Shumubu dan Masyumi. Kajian yang lebih luas oleh Idris (2022) mencoba menelusuri dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia lintas era, dari masa penjajahan hingga reformasi, sedangkan Daulay (2019) menempatkan periode ini dalam bingkai sejarah pertumbuhan dan pembaruan pendidikan Islam nasional.

Meskipun kajian-kajian tersebut telah memberikan gambaran yang cukup kaya, sebagian besar masih membahas kebijakan pendidikan umum dan pergerakan politik-keislaman sebagai dua tema yang berdiri sendiri-sendiri, tanpa secara eksplisit menautkan struktur kebijakan keagamaan masa pendudukan Jepang dengan jejak kelembagaan pendidikan Islam pascakemerdekaan. Kajian tentang pendidikan umum umumnya berhenti pada deskripsi jenjang dan kurikulum, sementara kajian tentang keislaman cenderung berfokus pada dimensi politik-organisatoris tanpa menariknya ke ranah pendidikan. Padahal, sebagaimana diisyaratkan oleh Hasanah dkk. (2023) dan Adnan Lira dkk. (2024), lembaga-lembaga yang dibentuk Jepang seperti Shumubu dan Masyumi memiliki keterkaitan historis dengan berdirinya Kementerian Agama serta penguatan jaringan madrasah dan pesantren setelah kemerdekaan. Terdapat kesenjangan analitis antara deskripsi kebijakan pada masa pendudukan dan penjelasan mengenai bagaimana kebijakan itu berkelanjutan secara struktural pada periode berikutnya.

Celah inilah yang menjadi fokus artikel ini, yaitu menganalisis secara terpadu kebijakan pendidikan Jepang dan implikasi jangka panjangnya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, baik pada ranah pendidikan umum maupun pendidikan Islam; dan (2) menganalisis implikasi kebijakan tersebut terhadap perkembangan kelembagaan pendidikan Islam, baik pada masa pendudukan maupun pada periode pascakemerdekaan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menempatkan periode pendudukan Jepang bukan sebagai episode yang terisolasi, melainkan sebagai mata rantai dalam genealogi kebijakan pendidikan keagamaan di Indonesia.

Urgensi kajian ini semakin terasa mengingat kebijakan pendidikan keagamaan di Indonesia hingga kini masih menyisakan perdebatan mengenai relasi antara negara dan lembaga pendidikan Islam. Memahami akar historis relasi tersebut pada masa pendudukan Jepang dapat memberi perspektif yang lebih jernih terhadap dinamika kontemporer, sekaligus menegaskan bahwa arsitektur kelembagaan pendidikan Islam nasional bukanlah entitas yang lahir secara instan, melainkan hasil dari proses panjang yang dibentuk oleh berbagai kepentingan politik lintas rezim. Kajian ini karenanya diharapkan berkontribusi tidak hanya pada historiografi pendidikan Islam, tetapi juga pada refleksi

kebijakan mengenai posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional (Muhajir dkk., 2021).

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menghubungkan tiga aras kajian yang selama ini cenderung terpisah, yaitu kebijakan pendidikan umum, kebijakan keagamaan Jepang terhadap Islam, dan warisan kelembagaan pendidikan Islam pascakemerdekaan. Melalui pembacaan yang mengaitkan ketiga aras tersebut, artikel ini menawarkan tesis tentang ambivalensi kebijakan pendidikan Jepang—represif di satu sisi dan akomodatif di sisi lain—sekaligus menjelaskan bagaimana ambivalensi itu justru meninggalkan warisan struktural yang bertahan lama. Dengan kerangka demikian, diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana periode pendudukan yang relatif singkat dapat membentuk arsitektur kelembagaan pendidikan Islam nasional modern yang bertahan hingga kini

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian historis (historical research), yang bertumpu pada studi kepustakaan (library research) terhadap sumber-sumber sekunder yang relevan dengan topik kebijakan pendidikan pada masa pendudukan Jepang dan pendidikan Islam di Indonesia. Pendekatan historis dipilih karena objek kajian bersifat peristiwa masa lampau yang menuntut rekonstruksi kronologis sekaligus interpretatif terhadap keterkaitan antar-kebijakan. Sumber data terdiri atas artikel-artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional yang terbit dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, serta buku-buku rujukan bidang sejarah pendidikan Islam sebagai pelengkap kerangka teoretis (Daulay, 2016; Qomar, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu penelusuran, pengumpulan, dan pencatatan data dari literatur yang relevan menggunakan basis data jurnal daring. Penelusuran diarahkan pada kata kunci yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Jepang, Shumubu, Masyumi, madrasah, dan pesantren guna memperoleh cakupan sumber yang memadai. Analisis data dilakukan dengan mengikuti empat tahapan metode sejarah, yaitu: (1) heuristik, yakni pengumpulan sumber-sumber tertulis yang membahas kebijakan pendidikan Jepang dan pendidikan Islam; (2) kritik sumber, yaitu menilai kredibilitas, otentisitas, dan relevansi sumber yang diperoleh; (3) interpretasi, yaitu menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan untuk membangun benang merah antar-kebijakan; dan (4) historiografi, yaitu penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis (Fadli & Kumalasari, 2019).

Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi tematik, kredibilitas penerbit, serta kemutakhiran terbitan, dengan prioritas pada artikel jurnal yang telah terakreditasi. Data yang telah terkumpul

selanjutnya dikategorikan ke dalam dua tema besar, yaitu kebijakan pendidikan umum dan kebijakan pendidikan khusus terhadap umat Islam, sebelum dianalisis secara komparatif untuk menemukan pola implikasinya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan antar-literatur untuk memperoleh konsistensi interpretasi, sehingga simpulan yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu sumber tunggal melainkan pada konvergensi bukti dari beragam kajian.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Kebijakan Pendidikan Umum: Penyederhanaan, Militerisasi, dan Mobilisasi Perang

Sejak awal pendudukannya pada 1942, Jepang menghapus sekolah-sekolah berbahasa Belanda dan menyederhanakan jenjang pendidikan menjadi struktur yang lebih ringkas serta mudah dikendalikan secara terpusat (Muslimin & Hudaidah, 2021). Perombakan ini menandai putusnya kontinuitas dengan sistem kolonial Belanda yang selama puluhan tahun membangun stratifikasi pendidikan berdasarkan ras dan status sosial, seperti pemisahan antara Europeesche Lagere School bagi anak Eropa dan Hollandsch-Inlandsche School bagi kalangan pribumi terpilih. Jepang menyatukan berbagai jalur tersebut ke dalam satu sistem tunggal yang seragam, sebuah langkah yang secara formal menghapus diskriminasi rasial dalam akses pendidikan dasar, meskipun motif di baliknya bukanlah keadilan sosial melainkan penyeragaman kontrol.

Pendidikan dasar diselenggarakan melalui Kokumin Gakko atau Sekolah Rakyat dengan masa belajar enam tahun yang dibuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, sebagai kebalikan dari sistem diskriminatif Belanda (Anggini dkk., 2024). Pendidikan menengah terbagi atas Shoto Chu Gakko (sekolah menengah pertama) dan Koto Chu Gakko (sekolah menengah atas) dengan jumlah lembaga yang sangat terbatas, sedangkan pendidikan tinggi hampir seluruhnya ditutup kecuali beberapa lembaga di bidang kedokteran dan teknik yang dianggap menunjang kebutuhan praktis pendudukan (Irawan & Yuliato, 2019). Pembatasan drastis pada jenjang menengah dan tinggi ini memperlihatkan bahwa Jepang tidak berkepentingan mencetak kaum terpelajar dalam jumlah besar, melainkan cukup menyediakan tenaga terampil tingkat dasar yang siap diserap ke dalam kebutuhan logistik perang.

Hudaidah dan Karwana (2022) menegaskan bahwa penyederhanaan jenjang ini tidak dimaksudkan untuk pemerataan mutu pendidikan, melainkan untuk memaksimalkan mobilisasi tenaga kerja dan prajurit guna mendukung kebutuhan perang Jepang. Orientasi mobilisatif itu tampak pula pada praktik

pengerahan pelajar untuk kerja bakti (kinrohoshi), latihan baris-berbaris, serta penanaman disiplin ala militer yang menjadikan sekolah sebagai wahana penyiapan tenaga cadangan. Dengan demikian, watak pendidikan umum pada masa ini lebih dekat pada fungsi indoktrinasi dan pelatihan fisik ketimbang pengembangan nalar kritis, sebuah karakteristik yang membedakannya secara tajam dari cita-cita pedagogis modern.

Dari sisi kurikulum, Jepang menghapus seluruh unsur pendidikan Barat dan menggantinya dengan muatan yang menekankan kedisiplinan, latihan fisik semi-militer, serta loyalitas terhadap Kaisar Jepang (Abbas, 2018). Para siswa diwajibkan mengikuti upacara penghormatan ke arah istana Kaisar (seikerei), menyanyikan lagu-lagu Jepang, serta menjalani latihan fisik yang ketat. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar utama, sementara bahasa Jepang diwajibkan sebagai mata pelajaran dan simbol dominasi kekuasaan (Ramadhani, 2021). Kebijakan bahasa ini bersifat paradoksal: di satu sisi dimaksudkan untuk menghapus jejak pengaruh Barat dan mengikat penduduk pada budaya penjajah baru, namun di sisi lain penggunaan bahasa Indonesia justru turut memperkuat kesadaran kebangsaan dan mempermudah komunikasi lintas daerah yang sebelumnya terkotak-kotak oleh dominasi bahasa Belanda (Hasnida, 2017).

Perhatian khusus juga perlu diberikan pada penutupan hampir seluruh pendidikan tinggi, kecuali bidang kedokteran dan teknik yang dipertahankan karena nilai gunanya bagi perang (Irawan & Yuliato, 2019). Kebijakan ini menimbulkan kekosongan pada jalur pembentukan kaum intelektual dan berdampak pada terputusnya regenerasi akademik yang sebelumnya dirintis pada masa kolonial Belanda. Meskipun demikian, penutupan tersebut tidak sepenuhnya mematikan denyut intelektual, sebab sebagian energi keilmuan justru bergeser ke ranah pergerakan dan ke lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang relatif memperoleh ruang lebih longgar. Ketimpangan orientasi antara pendidikan umum yang dipangkas dan pendidikan keagamaan yang diakomodasi menjadi salah satu ciri khas periode ini (Suyitno, 2021).

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan guru dan pelajar sebagai agen propaganda. Jepang menempatkan tenaga pengajar sebagai perpanjangan tangan ideologi pendudukan, sehingga sekolah difungsikan bukan sekadar tempat belajar melainkan juga wahana penanaman nilai-nilai kesetiaan kepada Dai Nippon (Abbas, 2018). Para pelajar dikerahkan dalam berbagai kegiatan kolektif, mulai dari senam massal, kerja bakti, hingga latihan kesiapsiagaan, yang seluruhnya diarahkan pada pembentukan mentalitas patuh dan siap berkorban. Praktik ini memperlihatkan bahwa mobilisasi pada masa Jepang menembus batas ruang kelas dan merasuk ke dalam keseharian pelajar, menjadikan pendidikan sebagai bagian integral dari mesin perang yang menyeluruh (Hudaidah & Karwana, 2022).

Temuan mengenai watak pendidikan umum ini memperkuat sekaligus mempertegas hasil kajian-kajian terdahulu. Sejalan dengan Muslimin dan Hudaidah (2021) serta Anggini dkk. (2024), penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerataan akses pendidikan dasar pada masa Jepang tidak diiringi peningkatan mutu, karena orientasi pendidikan lebih diarahkan pada kepentingan mobilisasi perang dibandingkan pengembangan intelektual. Perluasan akses yang terjadi bersifat kuantitatif dan instrumental, bukan kualitatif; sekolah dibuka lebar bukan untuk mencerdaskan, melainkan untuk menjangkau dan mengorganisasi tenaga rakyat secara lebih efisien. Dalam kerangka ini, klaim Jepang tentang penghapusan diskriminasi pendidikan perlu dibaca secara kritis sebagai efek samping dari logika penyeragaman kontrol, bukan sebagai tujuan emansipatoris.

Namun demikian, kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, sebagaimana dicatat Ramadhani (2021) dan Hasnida (2017), memberi dampak positif yang tidak diantisipasi oleh Jepang sendiri, yaitu memperkuat kohesi nasional dan mempermudah penyebaran gagasan lintas daerah. Bahasa yang semula dijadikan alat untuk memutus pengaruh kolonial Belanda berubah menjadi medium yang mempercepat pematangan nasionalisme Indonesia. Inilah salah satu bentuk ironi historis dari kebijakan pendudukan: sebuah instrumen yang dirancang untuk kepentingan penjajah pada akhirnya memberi modal simbolik bagi perjuangan kemerdekaan dan bagi penyatuan sistem pendidikan nasional pada tahun-tahun berikutnya.

Dimensi mobilisasi tersebut diperkuat pula melalui pengorganisasian pemuda di luar sekolah, seperti barisan pemuda dan latihan kesiapsiagaan, yang dalam praktiknya berfungsi sebagai perpanjangan dari sistem pendidikan formal. Melalui jalur ini Jepang menanamkan disiplin, semangat pengorbanan, dan loyalitas secara masif kepada generasi muda Indonesia (Fadli & Kumalasari, 2019). Bagi sebagian pengamat, pengalaman keterlatihan dan keterorganisasian pemuda pada masa ini meninggalkan efek ganda: di satu sisi ia merupakan alat indoktrinasi rezim pendudukan, namun di sisi lain ia turut menempa keterampilan berorganisasi dan keberanian yang kelak dimanfaatkan dalam perjuangan kemerdekaan (Muhajir dkk., 2021). Dengan demikian, watak represif pendidikan umum tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan konsekuensi sosial yang jauh melampaui rancangan awalnya.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan umum pada masa pendudukan Jepang menampilkan wajah yang represif, sentralistik, dan militeristik. Ia memangkas jenjang, menyeragamkan struktur, dan mengganti orientasi intelektual dengan orientasi loyalitas dan kesiapsiagaan fisik demi kepentingan perang (Abbas, 2018; Suyitno, 2021). Meskipun demikian, di balik watak represif tersebut tersimpan sejumlah konsekuensi tak terduga—terutama peneguhan bahasa Indonesia—yang kelak menjadi fondasi bagi integrasi pendidikan

nasional. Watak represif pada ranah umum inilah yang menjadi kontras penting ketika dibandingkan dengan pendekatan Jepang terhadap kelembagaan Islam, yang justru bercorak akomodatif sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

## 2. Kebijakan Akomodatif terhadap Kelembagaan Islam: Shumubu, Masyumi, dan Hizbullah

Berbeda secara diametral dengan pendekatan represif pada pendidikan umum, kebijakan Jepang terhadap Islam justru bercorak akomodatif secara politis. Sikap ini bukan lahir dari simpati keagamaan, melainkan dari perhitungan strategis bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk dengan jaringan sosial-keagamaan yang luas dan mengakar melalui pesantren. Jepang menyadari bahwa memperoleh dukungan dari kelompok ini jauh lebih menguntungkan bagi kepentingan perangnya dibandingkan menghadapinya secara konfrontatif, sebagaimana kesalahan yang dinilai telah dilakukan pemerintah kolonial Belanda (Saifudin & Saepuddin, 2020). Karena itu, alih-alih membatasi, Jepang berupaya merangkul kelembagaan Islam dan menariknya ke dalam struktur kekuasaan pendudukan.

Wujud paling nyata dari strategi akomodatif ini adalah pembentukan Shumubu. Pada Maret 1942, Jepang mendirikan Shumubu atau Kantor Urusan Agama di tingkat pusat, yang kemudian diikuti pembentukan cabang-cabangnya (Shumuka) di berbagai daerah pada tahun 1944 (Adnan Lira dkk., 2024). Lembaga ini semula dipimpin oleh perwira Jepang, namun kepemimpinannya kemudian diserahkan kepada tokoh ulama nasional, yang menandai keterlibatan langsung kalangan kiai dalam struktur birokrasi keagamaan pendudukan (Rizal, 2020). Penyerahan pucuk pimpinan Shumubu kepada ulama merupakan langkah simbolik sekaligus praktis yang memberi pengalaman administratif kepada kalangan agamawan dalam mengelola urusan keagamaan secara terpusat—sebuah pengalaman yang sebelumnya nyaris tidak pernah mereka miliki di bawah pemerintahan kolonial Belanda.

Langkah akomodatif berikutnya adalah penataan organisasi Islam. Pada akhir 1943, Jepang membubarkan MIAI dan menggantinya dengan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai wadah tunggal organisasi Islam yang lebih mudah dikoordinasikan (Hasanah dkk., 2023). Melalui Masyumi, Jepang berharap dapat mengendalikan aspirasi politik umat Islam melalui satu saluran resmi, sekaligus memobilisasi mereka untuk mendukung kebijakan perang. Namun, dari sudut pandang umat Islam sendiri, kehadiran Masyumi memberi manfaat yang tidak diperhitungkan Jepang: ia menyatukan beragam kelompok dan aliran keislaman lintas daerah ke dalam satu forum, sehingga memperkuat konsolidasi dan jaringan ulama secara nasional. Wadah tunggal yang semula dirancang sebagai alat kontrol berubah menjadi sarana penguatan solidaritas internal umat Islam.

Perekrutan kiai ke dalam struktur pendudukan tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan modal sosial yang dimiliki pesantren. Sebagai lembaga yang telah berakar berabad-abad, pesantren memiliki jaringan patron-klien yang kuat antara kiai dan santri serta pengaruh yang luas di tengah masyarakat pedesaan. Dengan merangkul kiai, Jepang berharap memperoleh akses pada basis massa yang sulit dijangkau melalui birokrasi formal semata (Saifudin & Saepuddin, 2020). Strategi ini efektif karena legitimasi kiai bersifat kultural dan keagamaan, sehingga instruksi yang disalurkan melalui mereka lebih mudah diterima dibandingkan perintah yang datang langsung dari penguasa asing. Pada titik inilah kelembagaan Islam menjadi simpul strategis dalam arsitektur kekuasaan pendudukan.

Transisi dari MIAI ke Masyumi juga menyimpan makna yang lebih dalam daripada sekadar pergantian nama organisasi. MIAI yang dibentuk pada masa kolonial Belanda bersifat federatif dan longgar, sedangkan Masyumi dirancang sebagai wadah yang lebih terpusat dan mudah dikoordinasikan sesuai kepentingan Jepang (Hasanah dkk., 2023). Meskipun demikian, sentralisasi tersebut secara tidak sengaja mempercepat proses pelembagaan kepemimpinan Islam pada skala nasional. Berbagai ormas keislaman yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri kini terdorong berkoordinasi dalam satu kerangka, sehingga terbentuk pengalaman berorganisasi lintas aliran yang menjadi bekal berharga bagi konsolidasi umat pada masa sesudahnya (Rizal, 2020).

Selain penataan birokrasi dan organisasi, Jepang juga memberi ruang bagi pembentukan barisan semi-militer berbasis pesantren, seperti Hizbullah, yang melibatkan santri dan kiai dalam latihan kemiliteran (Saminto, 2020). Pelibatan santri dalam pelatihan militer ini pada mulanya ditujukan untuk menyediakan tenaga cadangan pertahanan bagi Jepang, namun dalam praktiknya melahirkan kader-kader terlatih yang kelak berperan penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di tingkat lokal, sejumlah pesantren turut mengembangkan sistem pendidikan berbasis madrasah dengan kurikulum yang lebih terstruktur sebagai respons terhadap dinamika sosial-politik pada masa itu, sekaligus mempertahankan eksistensi kelembagaan pendidikan Islam di tengah tekanan pendudukan (Sofyan, 2022; Qomar, 2022).

Kebijakan akomodatif ini pada hakikatnya merupakan strategi Jepang untuk meraih dukungan mayoritas penduduk Muslim dan mencegah perlawanan, sebagaimana ditegaskan oleh Saifudin dan Saepuddin (2020), yang mencatat bahwa pendekatan Jepang terhadap Islam jauh lebih lunak dibandingkan kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial Belanda sebelumnya. Belanda cenderung memandang Islam sebagai potensi ancaman politik dan karena itu membatasi ruang geraknya, sedangkan Jepang justru memanfaatkannya sebagai instrumen mobilisasi. Perbedaan orientasi inilah yang menjelaskan mengapa kelembagaan Islam memperoleh pengakuan formal

dan ruang tumbuh yang lebih luas pada masa pendudukan Jepang dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Kontras antara kebijakan Jepang dan Belanda terhadap Islam menjadi semakin jelas ketika ditelaah lebih jauh. Pemerintah kolonial Belanda cenderung memandang Islam sebagai kekuatan politik yang berpotensi mengancam stabilitas kekuasaannya, sehingga aktivitas keagamaan diawasi ketat dan ruang gerak kelembagaan Islam dibatasi (Hasnida, 2017). Jepang menempuh jalan yang berlawanan dengan memberi pengakuan formal, ruang berorganisasi, dan bahkan posisi dalam birokrasi. Perbedaan ini bukan disebabkan oleh sikap yang lebih toleran, melainkan oleh kalkulasi strategis yang berbeda: Belanda mengutamakan kontrol represif, sementara Jepang mengutamakan kooptasi produktif demi menopang kepentingan perang (Saifudin & Saepuddin, 2020). Bagi umat Islam, pergeseran orientasi penguasa ini membuka ruang gerak yang jauh lebih luas dibandingkan periode sebelumnya.

Temuan ini memperkuat sekaligus memperluas hasil kajian terdahulu. Sejalan dengan Syarif (2019), penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pendidikan Jepang memiliki karakter ambivalen: represif dan militeristik pada tataran pendidikan umum, namun akomodatif secara strategis terhadap kelembagaan Islam. Ambivalensi ini bukan tanpa sebab; Jepang menyadari bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki jaringan sosial-keagamaan yang kuat melalui pesantren, sehingga kontrol terhadap kelompok ini dipandang lebih efektif dilakukan melalui pendekatan kooptasi kelembagaan dibandingkan represi terbuka (Rizal, 2020). Kooptasi terbukti menjadi metode pengendalian yang lebih halus namun lebih efektif untuk kelompok yang memiliki basis massa yang solid.

Lebih jauh, keterlibatan pesantren dalam mendirikan madrasah dan laskar Hizbullah, sebagaimana dilaporkan Sofyan (2022) dan Qomar (2022), menunjukkan bahwa pesantren tidak sekadar menjadi objek kebijakan Jepang, tetapi turut berperan aktif memanfaatkan ruang akomodasi yang tersedia untuk memperkuat basis pendidikan dan perjuangannya sendiri. Fenomena ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang dinamis: di satu sisi Jepang berupaya mengontrol umat Islam melalui kelembagaan formal, namun di sisi lain kalangan pesantren dan ulama memanfaatkan celah tersebut untuk memperkuat posisi tawar mereka. Pola pemanfaatan ruang serupa juga tampak pada penguatan organisasi Muhammadiyah pada periode berikutnya (Prabaswara & Wildan, 2023), yang menegaskan bahwa umat Islam bukan sekadar penerima pasif kebijakan, melainkan aktor yang cerdik membaca dan menggunakan peluang politik yang terbuka. Ringkasan kebijakan Jepang terhadap Islam beserta implikasinya disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kebijakan Jepang terhadap Islam dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

| Kebijakan/Lembaga | Bentuk Implementasi | Implikasi terhadap Pendidikan Islam |
|---|---|---|
| Shumubu (1942) & Shumuka (1944) | Kantor Urusan Agama pusat dan cabang daerah, dipimpin ulama nasional | Cikal bakal Kementerian Agama (1946) yang menaungi madrasah dan pendidikan Islam |
| Masyumi (1943) | Wadah tunggal organisasi Islam pengganti MIAI | Menyatukan jaringan ulama lintas daerah; menjadi basis partai politik Islam pascakemerdekaan |
| Hizbullah | Barisan semi-militer berbasis santri dan pesantren | Melahirkan kader santri terlatih yang berperan dalam perjuangan kemerdekaan |
| Bahasa Indonesia sebagai pengantar | Menggantikan bahasa Belanda di seluruh jenjang pendidikan | Memudahkan penyebaran pendidikan agama dan memperkuat persatuan nasional |
| Akomodasi kurikulum agama | Pembelajaran agama Islam dan bahasa Arab tetap diizinkan di sekolah | Mempertahankan eksistensi pendidikan agama di tengah represi pendidikan umum |

*Sumber: diolah dari Rizal (2020), Hasanah dkk. (2023), Adnan Lira dkk. (2024), dan Saminto (2020).*

### 3. Warisan Kelembagaan dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam Pascakemerdekaan

Implikasi paling penting dari kebijakan akomodatif Jepang justru baru tampak jelas setelah masa pendudukan berakhir. Jika penelitian Rizal (2020) dan Hasanah dkk. (2023) lebih menitikberatkan pada narasi pergerakan politik-keislaman masa pendudukan, penelitian ini menautkan lebih jauh keberadaan Shumubu dan Masyumi dengan jejak kelembagaan pendidikan Islam pascakemerdekaan. Struktur administratif yang dibangun Jepang melalui Shumubu, meskipun awalnya dimaksudkan sebagai alat kontrol dan propaganda, pada praktiknya memberi pengalaman kelembagaan bagi kalangan ulama dalam mengelola urusan keagamaan secara birokratis. Pengalaman inilah yang menjadi jembatan penting antara pengelolaan keagamaan yang semula

bersifat tradisional dan tersebar menuju bentuk pengelolaan yang lebih terpusat dan administratif.

Pengalaman kelembagaan tersebut menjadi salah satu modal penting ketika Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk pada awal 1946, yang selanjutnya menjadi induk pembinaan madrasah dan pendidikan agama secara nasional (Idris, 2022). Terdapat kesinambungan struktural yang jelas antara Shumubu pada masa pendudukan dan Kementerian Agama pada masa kemerdekaan: keduanya merupakan lembaga negara yang secara khusus menangani urusan keagamaan, dan sebagian personel serta pola kerjanya memiliki keterkaitan historis. Dengan demikian, meskipun tujuan awal Jepang murni bersifat politis dan eksploitatif, hasil sampingannya justru mempercepat konsolidasi kelembagaan pendidikan Islam yang sebelumnya berjalan secara tersebar dan swadaya. Kelembagaan yang sebelumnya bergantung pada inisiatif ulama dan masyarakat kini memperoleh payung negara yang memungkinkan pembinaan yang lebih sistematis (Daulay, 2019).

Warisan kedua terletak pada penguatan jaringan organisasi dan kepemimpinan umat. Masyumi, yang semula dibentuk Jepang sebagai wadah tunggal untuk memudahkan koordinasi, meninggalkan jejak berupa jaringan ulama lintas daerah yang telah terbiasa berkoordinasi dalam satu forum. Setelah kemerdekaan, jaringan ini bertransformasi menjadi basis bagi partai politik Islam dan bagi mobilisasi dukungan terhadap pendidikan keagamaan. Pengalaman berorganisasi secara nasional yang diperoleh selama masa pendudukan mempercepat kematangan politik umat Islam dan memperkuat kapasitas mereka dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan Islam di ruang kebijakan negara yang baru terbentuk.

Warisan tersebut juga tampak pada penguatan organisasi keislaman yang bergerak di bidang pendidikan. Pengalaman berorganisasi dalam wadah tunggal pada masa pendudukan memberi bekal bagi ormas-ormas Islam untuk mengembangkan lembaga pendidikannya secara lebih terstruktur pada masa berikutnya, sebagaimana tampak pada dinamika Muhammadiyah yang terus memperkuat jaringan sekolah dan madrasahnya (Prabaswara & Wildan, 2023). Kesinambungan ini memperlihatkan bahwa modal kelembagaan yang terbentuk pada masa Jepang tidak berhenti pada tataran birokrasi negara, tetapi juga meresap ke dalam gerakan pendidikan berbasis masyarakat. Dengan demikian, warisan pendudukan Jepang bekerja pada dua jalur sekaligus, yaitu jalur negara melalui Kementerian Agama dan jalur masyarakat melalui ormas serta pesantren.

Warisan ketiga tampak pada lahirnya kader santri terlatih melalui laskar Hizbullah. Para santri yang memperoleh pelatihan kemiliteran pada masa Jepang menjadi tulang punggung perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan, sekaligus membuktikan bahwa pesantren mampu memadukan

fungsi pendidikan keagamaan dengan fungsi perjuangan kebangsaan. Keterlibatan santri dalam perjuangan ini memperkuat legitimasi sosial dan politik pesantren di mata negara dan masyarakat, sehingga posisi lembaga pendidikan Islam semakin diperhitungkan dalam penataan pendidikan nasional pascakemerdekaan. Pesantren tidak lagi dipandang semata sebagai lembaga keagamaan tradisional, melainkan sebagai institusi yang turut berkontribusi pada pembentukan bangsa.

Pada aspek kebahasaan, kebijakan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar meninggalkan implikasi yang berkelanjutan bagi pendidikan Islam. Sebagaimana dicatat Hasnida (2017) dan Ramadhani (2021), pengukuhan bahasa Indonesia memudahkan penyebaran pendidikan agama Islam lintas daerah yang sebelumnya terhambat oleh dominasi bahasa Belanda dan sekat-sekat kedaerahan. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi medium utama pengajaran di madrasah dan sekolah agama di seluruh Nusantara, sehingga materi keislaman dapat diajarkan secara lebih seragam dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Dengan demikian, konsekuensi tak terduga dari kebijakan bahasa Jepang turut menopang integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

Rangkaian implikasi tersebut dapat dibaca melalui logika kesinambungan kelembagaan, yakni bahwa pilihan-pilihan struktural yang diambil pada masa pendudukan cenderung membentuk lintasan (path) yang diikuti pada periode berikutnya. Begitu Shumubu berdiri dan diserahkan kepada ulama, begitu Masyumi menyatukan jaringan keislaman, dan begitu santri memperoleh pelatihan terorganisasi, terbentuklah pola kelembagaan yang sulit dibalik dan justru diperkuat pada masa kemerdekaan. Warisan ini menjelaskan mengapa pendidikan Islam Indonesia pascakemerdekaan memiliki karakter yang khas: terlembaga secara nasional melalui Kementerian Agama, namun tetap mengakar pada basis pesantren dan madrasah yang otonom (Idris, 2022; Sofyan, 2022).

Bacaan ini juga memberi pelajaran yang relevan bagi kebijakan pendidikan keagamaan kontemporer. Pengalaman masa pendudukan memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan Islam mampu menunjukkan daya tahan dan kemampuan adaptif yang tinggi, bahkan di bawah tekanan rezim yang koersif. Kemampuan pesantren dan ulama membaca ruang politik, memanfaatkan celah akomodasi, dan mengubahnya menjadi modal konsolidasi merupakan karakter historis yang penting untuk dipahami dalam merumuskan relasi negara dan pendidikan Islam pada masa kini. Dengan demikian, penelusuran warisan pendudukan Jepang tidak semata bernilai historiografis, tetapi juga menyimpan implikasi praktis bagi tata kelola pendidikan keagamaan nasional (Daulay, 2019).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa periode pendudukan Jepang, meskipun relatif singkat, meninggalkan warisan struktural ganda bagi pendidikan Indonesia: di satu sisi trauma militerisasi dan

indoktrinasi pada pendidikan umum, dan di sisi lain fondasi kelembagaan yang justru mempercepat konsolidasi pendidikan Islam nasional pascakemerdekaan. Kedua warisan ini tampak kontradiktif, namun keduanya lahir dari logika yang sama, yaitu logika penataan dan pengendalian yang khas rezim pendudukan. Yang membedakan hasil akhirnya adalah bagaimana masing-masing bidang meresponsnya: pendidikan umum menanggung beban indoktrinasi, sementara kelembagaan Islam berhasil mengubah ruang akomodasi menjadi modal konsolidasi.

Implikasi ini penting dipahami sebagai bagian dari genealogi kebijakan pendidikan keagamaan di Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari konteks politik kolonial dan pendudukan yang membentuknya (Muhajir dkk., 2021). Menempatkan pendudukan Jepang dalam genealogi tersebut memungkinkan kita membaca kelembagaan pendidikan Islam modern—dari Kementerian Agama hingga jaringan madrasah dan pesantren—bukan sebagai produk yang lahir tiba-tiba pada masa kemerdekaan, melainkan sebagai hasil akumulasi pengalaman kelembagaan yang sebagiannya terbentuk di bawah tekanan pendudukan. Dengan pembacaan demikian, periode pendudukan Jepang perlu ditempatkan sebagai titik transisi kelembagaan yang formatif, yang meskipun lahir dari kepentingan penjajah, ikut membentuk arsitektur pendidikan Islam Indonesia sebagaimana dikenal hingga kini (Idris, 2022; Daulay, 2016).

## D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia bersifat ambivalen. Pada tataran pendidikan umum, kebijakan tersebut bercorak represif, sentralistik, dan militeristik, dengan orientasi utama pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan prajurit bagi kepentingan perang, sehingga mutu pendidikan mengalami kemunduran meskipun aksesnya menjadi lebih merata dibandingkan masa kolonial Belanda. Sebaliknya, pada tataran kelembagaan Islam, Jepang menempuh strategi akomodatif melalui pendirian Shumubu, pembentukan Masyumi, serta pelibatan kiai dan santri dalam struktur birokrasi dan barisan semi-militer, sebagai upaya meraih dukungan politik mayoritas penduduk Muslim.

Implikasi dari kebijakan akomodatif tersebut ternyata melampaui kepentingan jangka pendek Jepang. Struktur kelembagaan yang dibangun pada masa pendudukan menjadi fondasi penting bagi konsolidasi pendidikan Islam pascakemerdekaan, tercermin dari lahirnya Kementerian Agama, menguatnya jaringan madrasah dan pesantren, serta terbentuknya kader ulama dan santri yang berperan aktif dalam perjuangan dan pembangunan pendidikan Islam nasional. Dengan demikian, periode pendudukan Jepang perlu dipahami bukan semata sebagai babak kemunduran pendidikan, melainkan juga sebagai titik transisi kelembagaan yang turut membentuk arsitektur pendidikan Islam

Indonesia modern. Temuan ini sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk menelusuri secara lebih mendalam keterkaitan personal dan administratif antara Shumubu dan Kementerian Agama melalui sumber-sumber arsip primer, sehingga garis kesinambungan kelembagaan yang diajukan dalam artikel ini dapat diverifikasi secara lebih rinci.

**Daftar Pustaka**

Anwar, S., & Umam, H. (2020). Transformative education: Emphasizing 21st century skills and competencies in the independent learning curriculum. *AIM: Journal of Islamic Education Management, 1*(1), 1–16. https://doi.org/10.15575/aim.v1i1.28886

Anwar, S., Maulani, F., Lutfiah, W., Syadiah, S. I. H., & Azizah, A. S. N. (2025). Integrasi nilai ketauhidan dan ekopedagogi dalam kurikulum madrasah ibtidaiyah untuk penguatan karakter peduli lingkungan. *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 7*(1).

Abbas, A. (2018). Pendidikan di Indonesia pada masa Jepang. Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 4(1), 62–75.

Adnan Lira, R., Ridhwan, R., & Fatimah, F. (2024). Perubahan budaya masyarakat Indonesia (studi pada pendidikan masa pendudukan Jepang). Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, 6(2), 204–219.

Anggini, A., Susanti, E., Duha, D. S., Riski, F., Reonaldi, R., & Rahman, S. (2024). Keadaan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa, 2(2), 131–140. https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v2i2.3432

Daulay, H. P. (2016). Pemberdayaan pendidikan agama Islam di sekolah. Prenada Media Group.

Daulay, H. P. (2019). Sejarah pertumbuhan dan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Kencana.

Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 13(2), 189–205.

Hasanah, N., Tsaqif As'ad, M. Y., Nasikhin, N., & Fihris, F. (2023). Perkembangan peradaban Islam Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(2), 87–97. https://doi.org/10.69698/jpai.v1i2.432

Hasnida, H. (2017). Sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa pra kolonialisme dan masa kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu). Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(2), 237–256.

Hudaidah, H., & Karwana, M. A. P. (2022). Pendidikan di Indonesia masa pendudukan Jepang. Danadyaksa Historica, 1(2), 97–104. https://doi.org/10.32502/jdh.v1i2.4243

Idris, M. A. (2022). Multikulturalisme dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia (dari masa penjajahan hingga reformasi). Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam, 10(1), 79–100. https://doi.org/10.21274/taalum.2022.10.1.79-100

Irawan, H., & Yuliato, E. (2019). Pendidikan di Pulau Jawa pada masa pendudukan Jepang. Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah, 3(1), 1–9.

Muhajir, A., Sumatri, P., & Gultom, A. Z. (2021). Memori sejarah dan warisan pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai potensi wisata sejarah. Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.30743/mukadimah.v5i1.3665

Muslimin, Y., & Hudaidah, H. (2021). Pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Journal of Practice Learning and Educational Development, 1(3), 130–134. https://doi.org/10.58737/jpled.v1i3.8

Prabaswara, S. S., & Wildan, M. (2023). Kontribusi Suara Muhammadiyah bagi pengembangan masyarakat Islam di Indonesia (1915–1957). Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam, 19(2), 229–242. https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v19i2.21108

Qomar, M. (2022). Pesantren: Dari transformasi metodologi menuju demokratisasi institusi. Erlangga.

Ramadhani, S. (2021). Sejarah perkembangan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan, 8(1), 20–29. https://doi.org/10.29408/jhm.v8i1.3410

Rizal, A. N. S. (2020). Pergerakan Islam Indonesia masa Jepang (1942–1945). Jurnal Indo-Islamika, 4(2), 179–189. https://doi.org/10.15408/idi.v4i2.17394

Saifudin, S., & Saepuddin, D. (2020). Pengaruh kolonialisme Jepang terhadap pendidikan Islam. Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 9(2), 164–177.

Saminto, S. S. (2020). Peran pendidikan di masa kependudukan Jepang (1942–1945) terhadap perubahan budaya di Jawa Barat. Jurnal Artefak, 7(2), 76–88.

Sofyan, S. (2022). Eksistensi pendidikan dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 16(1), 344–356.

Suyitno, S. (2021). Sejarah pendidikan Indonesia. UNY Press.

Syarif, M. (2019). Politik pendidikan Jepang dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Keislaman, 7(3), 247–266.